



Peran Jogja Merebut Kemerdekaan

OLEH : MU'ARIF

KOTA Jogja yang didirikan oleh Sultan Hamengku Buwono I pada 7 April 1755, memiliki kontribusi yang besar bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak pertama berdiri, keberadaan kota Jogja sudah bersinggungan dengan kolonial Belanda. Pecahnya kerajaan Mataram lewat Perjanjian Giyanti merupakan produk politik *adu domba* kolonial Belanda.

Perjuangan Keraton Jogja dalam merebut kemerdekaan dimulai pada masa pemerintahan Sultan HB II. Satu-satunya kerajaan yang masih eksis di bumi nusantara ini mengalami tekanan berat dari pihak kolonial. Bahkan, Sultan HB II sampai harus ditangkap dan diasingkan ke Pulau Pinang.

Kontribusi Keraton Jogja dalam merebut kemerdekaan RI tidak bisa diabaikan. Pada tahun 1812, ketika kolonial Inggris menjajah nusantara, kerajaan ini menghadapi perlawanan keras dari pasukan Raffles. Di bawah komando Raffles, pasukan Inggris menyerbu keraton dan menghancurkan beberapa bagian penting kerajaan ini, seperti kompleks Taman Sari.

Perlawanan keraton Yogyakarta terhadap pemerintah kolonial terus berlanjut sampai masa Sultan HB III (1812-1814). Pada masa pemerintahan Sultan HB IV, perjuangan keraton Yogyakarta untuk memperoleh kemerdekaan terus berlanjut. Namun, pada tahun 1855-1939, keraton Yogyakarta berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda kembali untuk beberapa puluh tahun lamanya. Keraton Yogyakarta

memainkan strategi perjuangan baru menghadapi Belanda.

Pada masa pemerintahan Sultan HB VI (1855-1877) dikembangkan kegiatan seni sastra yang bertujuan untuk menyatukan antara rakyat dan keraton. Kemudian di masa Sultan HB VII (1877-1921) dikembangkan sektor perekonomian untuk memakmurkan kehidupan rakyat. Sultan HB VIII (1921-1939) memajukan pendidikan untuk mencederaskan kehidupan rakyat.

Langkah-langkah perjuangan yang dilakukan oleh penguasa keraton Yogyakarta mulai tahun 1855 hingga 1939 sangat berarti bagi pembentukan masyarakat Jogja yang berbasis budaya. Perkembangan seni sastra, perekonomian dan pendidikan menjadi cikal-bakal terbentuknya status

Yogyakarta sebagai "Kota Budaya" dan "Kota Pendidikan" di kemudian hari.

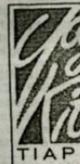
Pada tahun 1825-1830, tercatat peristiwa besar dalam sejarah keraton Yogyakarta. Pecah Perang Pangeran Diponegoro merupakan sejarah emas bahwa pihak keraton Yogyakarta tidak sepenuhnya berada di bawah tekanan kolonial Belanda. Meskipun perang ini tidak berhasil menandai kemerdekaan, tetapi telah merepotkan pihak Belanda untuk beberapa tahun lamanya.

Pada tanggal 5 September 1945, beberapa hari setelah pengumuman deklarasi Kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustus 1945), pihak ke-

raton Yogyakarta menyatakan bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia (RI). Pernyataan penggabungan kota Jogja kepada pihak RI dituangkan dalam Amanat Sultan HB IX tanggal 5 September 1945. Kemudian, pada tanggal 6 Januari 1946, Kota Jogja dinyatakan sebagai Ibukota Negara RI, sebab Jakarta waktu itu dalam kondisi genting.

Tahun 1948, kota Jogja menjadi basis perlawanan Divisi Siliwangi TNI di bawah seorang pejuang kita, Letnan Jenderal Soedirman. Inilah peristiwa akbar dalam sejarah Yogyakarta di mana seorang pemimpin pasukan yang telah sakit-sakitan berhasil memimpin "perang gerilya" yang cukup terkenal dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada puncaknya, tanggal 1 Maret 1949, di Yogyakarta terjadi perang selama enam hari yang kemudian dikenal dalam sejarah bangsa ini sebagai "Serangan Umum Satu Maret." Peristiwa bersejarah ini kemudian diabadikan dalam sebuah monumen yang sekarang masih berdiri kokoh di depan Kantor Pos Besar Yogyakarta. Perlu dicatat dalam hal ini bahwa keterlibatan pihak keraton Yogyakarta sangat besar dan menentukan dalam Serangan Umum Satu Maret. Tujuan perang ini adalah untuk membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada.

Beberapa bulan setelah Serangan Umum Satu Maret, pihak kolonial



Walik
Wakil
Sekre
Asiste



Belanda menarik pasukannya dari Yogyakarta. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal sebagai "Jogja Kembali" dan kemudian diabadikan dalam bentuk sebuah museum yang dikenal dengan "Museum Jogja Kembali" (dibangun 29 Juni 1985).

Pada tanggal 4 Maret 1950, pemerintah RI menetapkan wilayah Yogyakarta dan Pakualaman sebagai bagian integral dari RI. Pada saat itulah, Yogyakarta memperoleh status sebagai "Daerah Istimewa" karena sistem pemerintahan daerah yang berlaku adalah monarki (kerajaan). Yogyakarta merupakan satu-satunya daerah dengan sistem pemerintahan turun-temurun. Namun sayang, UU tentang Keistimewaan Yogyakarta, hingga detik ini, masih menjadi perdebatan di kalangan dewan (DPR). Mestinya pemerintah menengok sejarah. Sebab, sejak tahun 1950, kota ini sudah mendapat pengakuan akan keistimewaan-nya oleh pemerintah.

Perlu dicatat, di Indonesia, hanya terdapat dua daerah yang memiliki status sebagai "Daerah Istimewa." Yang pertama adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (dengan sistem monarki) dan yang kedua adalah propinsi Aceh sebagai kawasan yang memiliki kultur khas keislaman yang kuat (kawasan Serambi Makkah).

Pada tanggal 25 Maret 1973, Sultan HB IX menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Namun, karena alasan kesehatan, beliau menyatakan mundur dari jabatan tersebut. Inilah salah satu ciri khas dari sosok yang berjiwa besar, Sultan HB IX, karena alasan kesehatannya sehingga beliau tidak dapat berbuat banyak untuk bangsa ini dan akhirnya dengan *legawa* menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden.

Tahun 1966-1975 merupakan upaya pembangunan kota Yogyakarta. Di tahun ini mulai dibangun Balaikota Jogja, renovasi Jalan Malioboro, pasar Brinjarjo, shopping centre, dan sasana Triguna. Di tahun 1986-1992 kota Jogja mulai mempercantik diri dengan menata berbagai fasilitas

umum yang akan menopang Yogyakarta sebagai kota yang Berhati Nyaman. Dan benar, pada tahun 1992-2001 kota Jogja telah mempercantik diri hingga akhirnya menerima penghormatan Adi Pura tiga kali berturut-turut. Di tahun-tahun ini juga, kota Jogja memperoleh penghormatan Widya Karma (pendidikan) dan Prokasih (lingkungan).

Pada tanggal 20 Mei 1998, kota Jogja turut berkiprah dalam menentukan arah perjuangan bangsa. Pihak keraton Yogyakarta turut membidani "Reformasi" yang akhirnya menggulingkan Orde Baru. Sebanyak 500.000 orang dari berbagai elemen masyarakat bersama Sultan HB X melakukan aksi damai menuntut Reformasi. Ini juga yang menjadi ciri khas Yogyakarta sebagai "Kota Tenteram" dan "Berhati Nyaman."

Berbagai upaya mewujudkan cita-cita kota Jogja berdasarkan akar filosofinya, "kota yang indah (nyaman) dan bermatrabat," pada tahun 2004 mulai membangun dan memelihara warisan-warisan budaya luhur peninggalan zaman dahulu sebagai bagian dari budaya bangsa. Pada tahun 2005, Yogyakarta berhasil menggondol kembali penghormatan Adi Pura.

Torehan sejarah keraton Yogyakarta bukan hanya berisi pengabdian kepada bangsa ini, tetapi serangkaian penderitaan yang harus ditelan secara getir oleh rakyat. Tanggal 28 Mei 2006 Yogyakarta dan sekitarnya diguncang oleh gempa hebat berkekuatan 5,9 skala Richter. Korban jiwa mencapai 218 orang. Dan kerusakan fisik sebanyak 6.095 unit serta kerusakan ringan sebanyak 15.364 unit. Termasuk dalam korban kerusakan tersebut adalah beberapa situs dan peninggalan bersejarah, di antaranya adalah keraton Yogyakarta.

Atas dasar inilah, sungguh sangat disesali, mengapa masih banyak pihak yang keberatan atas status keistimewaan Yogyakarta. Sampai sekarang UU Keistimewaan Yogyakarta masih mengambang. Padahal, peran Yogyakarta dalam merebut dan mengisi kemerdekaan sudah sangat jelas menghiasi tinta emas sejarah bangsa Indonesia. ***

Mu'arif, Jurnalis, penggiat Komunitas Aksara Yogyakarta.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Teknologi Informasi dan	Negatif	Segera	Untuk Ditanggapi
2. Dinas Pengelolaan Pasar			

Yogyakarta, 17 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005